

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut tabel penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian implementasi konsep *Community Based Tourism* (CBT) sebagai upaya dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan& Persamaan
1.	<i>What Role Can Community Based Tourism Have in Sustainable Development?</i> (Nafidah, 2020)	Konsep <i>Community Based Tourism, Sustainable Development</i>	Temuan empiris menunjukkan bahwa CBT memiliki peran dalam pencapaian SDGs. CBT terbukti mampu menstimulasi perekonomian desa, hal ini tercermin dari meningkatnya perekonomian masyarakat desa dan adanya kesempatan kerja bagi anggota masyarakat. Selain itu, kualitas hidup masyarakat juga menuju kearah yang lebih baik. Dengan CBT, potensi desa dapat tergali dengan baik sehingga kondisi lingkungan desa semakin baik dengan tetap selaras dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.	Perbedaan: objek penelitian pada penelitian ini bersifat umum, sedangkan pada penelitian yang akan datang menggunakan objek wisata Pandansili, Ngampungan. Persamaan: menggunakan fokus penelitian penerapan <i>Community Based Tourism</i> dan <i>Sustainable Development</i> .

2.	<p><i>Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang</i> Invalid source specified.</p>	<p><i>Community Based Tourism (CBT)</i></p>	<p>Komponen rakyat pada pengembangan serta mengelola daerah wisata Ceking pada umumnya ialah semua warga desa Tegallalang. Pengelolaan kawasan wisata oleh rakyat desa Tegallalang melalui sebuah badan pengelola sudah memberikan peran rakyat pada pengembangan daya tarik Ceking. Peran ini mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Perbedaan: pada penelitian ini objek wisata dan fokus penelitian yang digunakan berbeda.</p> <p>Persamaan: penelitian ini dan penelitian yang akan datang memiliki satu fokus penelitian yang sama, yaitu penerapan <i>Community Based Tourism</i>.</p>
3.	<p>Mediasi <i>Community Based Tourism</i> Pada Pengaruh Peran Desa Adat Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Panglipuran Kabupaten Bangli Invalid source specified.</p>	<p><i>Community Based Tourism, pariwisata berkelanjutan</i></p>	<p>Kiprah desa adat dan <i>Community Based Tourism</i> berpengaruh positif serta signifikan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan pada desa Panglipuran, Bangli. Menggunakan mediasi <i>Community Based Tourism</i>, desa adat menyampaikan stimulus positif bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan.</p>	<p>Perbedaan; onjek yang digunakan pada penelitian ini adalah desa Adat Panglipuran, sedangkan pada penelitian yan akan datang menggunakan objek wisata Pandansili, Ngampungan.</p> <p>Persamaan: menggunakan fokus penelitian yang sama yaitu <i>Community Based Tourism</i> dalam mencapai pariwisata berkelanjutan.</p>

4.	<p>Studi Evaluasi Penerapan <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan Invalid source specified.</p>	<p><i>Community Based Tourism</i>, agrowisata berkelanjutan .</p>	<p>Di kota Batu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diidentifikasi dengan berkembangnya desa-desa wisata pada semua daerah di kota Batu. Untuk mendukung eksistensi desa wisata, Dinas Pariwisata serta pelaku Ekonomi Kreatif kota Batu membentuk membuat pasar dan melakukan promosi. Terdapat 2 kendala pada aplikasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu aspek pemerintah serta adanya kendala eksternal.</p>	<p>Perbedaan: pada penelitian ini menggunakan objek penelitian kota Batu, sedangkan pada penelitian yang akan datang menggunakan objek penelitian wisata Pandansili, Ngampungan.</p> <p>Persamaan: fokus penelitian yang digunakan yaitu penerapan konsep <i>Community Based Tourism</i>.</p>
5.	<p><i>The Implementation of Creative Tourism Concept in Community Based Tourism</i> Invalid source specified.</p>	<p><i>Community Based Tourism, Creative Tourism Concept.</i></p>	<p>Konsep pariwisata kreatif dalam <i>Community Based Tourism</i> menitikberatkan pada peningkatan aktivitas dan produk pengalaman antara masyarakat local dengan wisatawan. Penerapan konsep pariwisata kreatif bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu pemahaman konsep pariwisata kreatif sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan konsep pariwisata kreatif dalam <i>Community Based Tourism</i>.</p>	<p>Perbedaan: pada penelitian ini menggunakan fokus penelitian konsep <i>creative tourism</i>, sedangkan pada penelitian yang akan datang fokus penelitian terhadap <i>Sustainable Development</i>.</p> <p>Persamaan: salah satu fokus penelitian yaitu menggunakan pariwisata berbasis masyarakat atau <i>Community Based Tourism</i>.</p>

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

SDGs merupakan program pembangunan internasional dengan 17 tujuan yang terbagi dalam 169 sasaran. Sasaran dan tujuan tersebut saling terkait, terhubung, terintegrasi satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang menyepakati agenda SDGs menunjukkan komitmen dan keselarasan dalam pelaksanaan SDGs dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Untuk mengatasi isu-isu tersebut, disusunlah 17 tujuan SDGs sebagai berikut: (Badan Pusat Statistik, 2016)



Gambar 2.1 17 tujuan SDGs

Dalam pelaksanaannya SDGs memiliki beberapa prinsip yang telah dijadikan kesepakatan dan diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama yaitu universality, prinsip yang mendorong penerapan SDGs di seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang. Prinsip kedua yaitu integrasi, prinsip

ini bermakna SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait dalam semua bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan prinsip terakhir yaitu “*No One Left Behind*”, prinsip yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sjahrir, sebagai salah satu pendiri republik ini menegaskan bahwa sebagai entitas sosial, desa merupakan variable penting bagi kemajuan Indonesia. Karena itulah, apabila menginginkan kemajuan negara dan bangsa Indonesia, yang utama dan penting diwujudkan pertama-tama adalah kemajuan desa. Desa merupakan ruang teritori terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas persoalan sosial-ekonomi. Desa adalah basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Apabila permasalahan sosial-ekonomi di pedesaan dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan.

Desa merupakan sumber identifikasi masalah, desa memiliki jumlah kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan juga rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah dibandingkan dengan kota. Karena itulah, memperbaiki pembangunan manusia, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan Indonesia maju, mulailah dari desa

Selain ditinjau dari aspek kewilayahan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2019, wilayah pedesaan mencapai 91% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Faktanya dalam beberapa kejadian, baik

dalam aspek sosial dan ekonomi, desa membuktikan sebagai entitas sosial yang paling tangguh, paling kuat bertahan dari krisis, begitu pula desa memiliki ketahanan sosial ekonomi yang lebih kuat daripada kota.

Pada tahun 2020 Kemendes PDTT mengeluarkan program turunan dari SDGs internasional menjadi SDGs desa dengan tujuan menciptakan pemerataan dan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, bahwa pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan pembangunan yang inklusif serta menerapkan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Iskandar, 2020)

SDGs desa juga menambahkan satu tujuan dari tujuh belas tujuan yang termuat dalam SDGs internasional, sebagai berikut:



Gambar 2.2 18 tujuan SDGs Desa

Kemendes PDDT dengan delapan belas tujuan tersebut dijadikan sebagai alat ukur suatu desa dapat mencapai SDGs desa yang tentunya juga berdampak terhadap SDGs internasional. Dalam SDGs desa terbagi menjadi delapan tipe desa, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:

1) Desa tanpa kemiskinan:

- a. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
- b. Persentase warga desa peserta SJSn Bidang Kesehatan
- c. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
- d. Keluarga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
- e. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai mencapai 100%

2) Desa tanpa kelaparan:

- a. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
- b. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
- c. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan

2. Desa peduli kesehatan:

3) Desa sehat dan sejahtera:

- a. BPJS kesehatan mencapai 100% penduduk
- b. Angka kematian ibu 0% dari per 100.000 kelahiran, sedangkan angka kematian bayi 0% dari per 1jt kelahiran
- c. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
- d. Angka kelahira pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 0%

6) Desa layak air bersih dan sanitasi:

- a. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga
- b. Keluarga dan industry yang dilayani air baku mancapai 100%
- c. Keluarga dan industry pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%
- d. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)

11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman:

- a. Rumah kumuh mencapai 0%
- b. Tersedia peringatan dini bencana
- c. Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 200%
- d. Penduduk yang pindah ke kota <15

3. Desa peduli pendidikan:

4) Pendidikan desa berkualitas:

- a. Angka melek aksara latin dan non katin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%
- b. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
- c. Tersedia taman baca masyarakat atau perpustakaan

4. Desa ramah perempuan:

1) Keterlibatan perempuan desa:

- a. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
- b. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
- c. Median usia kawin pertama perempuan di atas 18 tahun

5. Desa ekonomi tumbuh merata:

8) Pertumbuhan ekonomi desa merata:

- a. Pekerja sektor formal minimal 51%
- b. Tingkat pengangguran terbuka 0%
- c. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
- d. Wisatawan meningkat

9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan:

- a. Jalan kondisi baik mencapai 100%
- b. Industri yang mencemari udara mencapai 0%

10) Desa tanpa kesenjangan:

- a. Koefisien gizi desa dibawah 0,200
- b. Tingkat kemiskinan 0%

12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan:

- a. Tersedia unit pengelolaan sampah
- b. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga

6. Desa peduli lingkungan:

14) Desa peduli lingkungan laut:

- a. Tersedia Perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut
- b. Penangkapan ikan meningkat secara wajar sesuai jenis ikan
- c. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luar desa
- d. Tidak ada illegal fishing

15) Desa peduli lingkungan darat:

- a. Tersedia Perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
- b. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa

- c. Luas lahan hutan rusan dan lahan kritis di hutan mencapai 0%
- d. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%

7. Desa berjejaring:

17) Kemitraan untuk pembangunan desa

- a. Terdapat kerja sama dengan desa lain, pihak ketiga dan lembaga internasional
- b. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
- c. Komoditas desa yang diekspor meningkat
- d. Tersedia aplikasi dan petugas bidang statistik di desa

8. Desa tanggap budaya:

16) Desa damai berkeadilan:

- a. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
- b. Perdagangan manusia mencapai 0%
- c. Tingkat kepuasan pelayanan pemerintah desa tinggi
- d. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani

18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif:

- a. Tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa
- b. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
- c. Lembaga masyarakat yang ikut musyawarah desa mencapai >30%
- d. Bumdes terakreditasi minimal B

SDGs menjadi acuan utama pembangunan jangka menengah desa di seluruh Indonesia. SDGs telah terbukti memudahkan untuk mengukur perkembangan dan pembangunan. Selain itu, kehadiran SDGs desa merupakan bentuk optimalisasi penggunaan dana desa yang telah diberikan kepada desa untuk menciptakan alur pembangunan yang inklusif. Dengan SDGs desa diharapkan tujuan yang ditempuh desa menjadi lebih jelas, terarah, dan terukur. Dengan demikian, desa menjadi lebih maksimal dan lebih mudah untuk melaksanakan pembangunan.

2.2.2 Konsep *Community Based Tourism* (CBT)

Pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* menurut (The ASEAN Secretariat, 2016) adalah bentuk pariwisata yang memberdayakan masyarakat untuk mengelola pertumbuhan pariwisata dan mengembangkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta mencakup pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. CBT juga melibatkan dukungan masyarakat untuk usaha kecil pariwisata yang bertujuan memberikan dukungan untuk

meningkatkan kesejahteraan proyek-proyek masyarakat, seperti pengembangan wisata desa.

Setiap pengembangan destinasi wisata dikembangkan dengan mengadopsi konten yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan masyarakat setempat serta kearifan lokal termasuk dalam mengembangkan daya tarik wisatawan dan sarana wisatanya. Oleh karena itu, konsep CBT dianggap sesuai dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Menurut Suansri (2003:21-22) dalam (Nurhidayati & Fandeli, 2012) *Community Based Tourism* memiliki dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata
2. Dimensi sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua, serta membangun penguatan organisasi
3. Dimensi budaya, dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal

4. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carry capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.

Dengan dimensi tersebut diharapkan masyarakat lokal setempat dapat terus mengembangkan diri dan daerahnya sesuai dengan karakter dan nilai-nilai budaya setempat. Karya masyarakat lokal inilah yang menjadi kekayaan destinasi dan dapat menjadi daya tarik wisatawan. Teori ini mengukuhkan bahwa *Community Based Tourism* sebagai pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Aspek ekonomi itu sendiri akan menjadi dampak berkelanjutan dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.

Secara konseptual, prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar besarnya diprioritaskan keberuntukannya bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di kawasan pariwisata.

(Sunaryo, 2013) mengatakan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata. Mulai dari kerangka perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan harus

memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Salah satu konsep yang menjelaskan peranan masyarakat tersebut dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT).

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata terdiri atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan distribusi keuntungan yang didapat masyarakat dari destinasi wisata. Terdapat tiga prinsip utama sebagai strategi dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* yaitu, mengikut sertakan masyarakat dalam setiap keputusan, adanya penerimaan manfaat oleh masyarakat lokal yang bersumber dari kegiatan pariwisata, serta menjamin sustainabilitas lingkungan dan memelihara karakter dan budaya lokal yang unik (Sunaryo, 2013).

Dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat dari pembangunan pariwisata diperuntukkan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.2.3 Desa Wisata

Desa wisata adalah wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu untuk merasakan keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan dengan segala potensinya. Desa

wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria memiliki potensi daya tarik wisata (alam, budaya, dan buatan), memiliki komunitas, memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam kegiatan pengembangan desa wisata, memiliki lembaga pengelolaan, memiliki peluang dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana desa untuk mendukung kegiatan pariwisata. (Nusastiawan, 2012)

Desa wisata merupakan salah satu alternatif wisata yang dapat dikembangkan pada era ini. Desa wisata relevan dengan pergeseran model pembangunan pariwisata yang menitikberatkan pada aspek sosial, ekologi, dan berbasis masyarakat. Zebua (2016) dalam (Utami, Taufik, & Bhakti, 2019) mengatakan bahwa desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan keunikan fisik dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat sebagai daya tariknya.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2018) dalam (Nusastiawan, 2012) menyebutkan bahwa desa wisata adalah desa yang memiliki daya tarik tersendiri (dapat berupa keunikan fisik lingkungan pedesaan, serta kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik. Desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyak kegiatan ekonomi di desa yang dapat tercipta. Selain itu, desa wisata juga dapat menjadi upaya dalam melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Menurut (Kementerian Pariwisata, 2019) dalam pengembangannya desa wisata dapat dibentuk dengan tiga lembaga pengelolaan yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat sekitar, yaitu:

a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok ini dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata setempat sebagai penggerak kegiatan sadar wisata dan pelaksanaan Sapta Pesona. Di Pokdarwis akan ada beberapa kelompok kerja untuk kegiatan pariwisata dalam satu destinasi atau satu desa yang memiliki destinasi wisata. Anggota Pokdarwis merupakan pelaku dalam kegiatan pariwisata di desa.

b. Koperasi

Desa wisata juga dapat dikelola oleh koperasi, dimana koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang merupakan pengurus koperasi dan dikukuhkan oleh Dinas Koperasi setempat sebagai badan hukum yang berkewajiban mengelola kegiatan dan memperoleh keuntungan (sisa laba/SHU) dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Pengurus koperasi dapat dimutakhirkan secara berkala atau sesuai usulan dalam RAT.

c. BUMDes

BUMDesa adalah badan hukum resmi desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

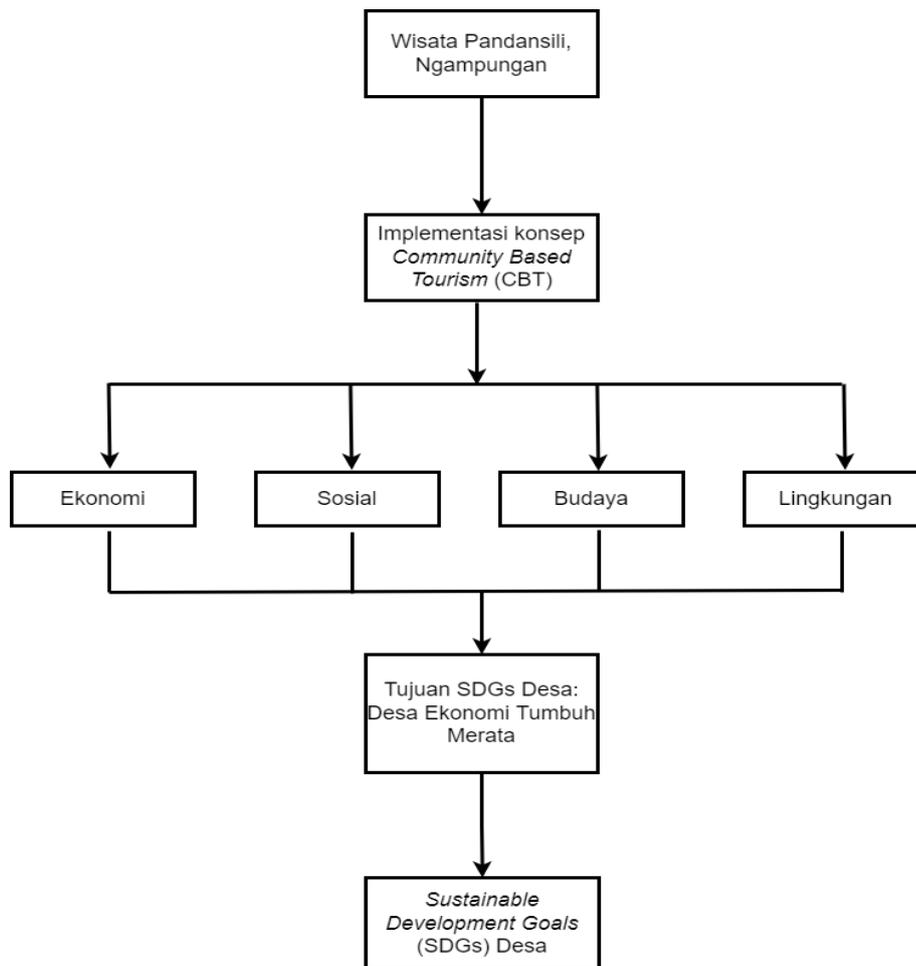
melalui musyawarah desa. Lembaga BUMDes dibentuk menyerupai perusahaan, dimana sahamnya adalah milik pemerintah desa dengan mengangkat pengurus untuk menjalankan usaha di desa dengan skema penyertaan modal dan aset desa. Di antara sekian banyak usaha yang dapat dilakukan oleh BUMdes, salah satunya adalah usaha pariwisata desa yang memiliki potensi dan produk wisata di desa.

Sesuai dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT) desa wisata menjadikan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan sosialnya, kelompok swadaya dan kelompok swadaya masyarakat berusaha untuk meningkatkan pemahaman pariwisata, mengakomodasi peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di daerah, meningkatkan nilai pariwisata dan memberdayakannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelaku utama, masyarakat atau komunitas berupaya untuk meningkatkan potensi wisata atau daya tarik wisata di daerahnya, selanjutnya masyarakat atau komunitas mempersiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan ketika berkunjung, segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas di kawasan tersebut. Desa wisata memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki daerah itu.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian implementasi konsep *Community Based Tourism* sebagai upaya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa di wisata Pandansili, Ngampungan dapat digambarkan pada bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Konseptual

Dalam suatu pariwisata terdapat pelaku dalam mengembangkan objek wisata, salah satunya adalah masyarakat setempat objek wisata itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT) sebagai

konsep pengukuran pengembangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa tipe Desa Ekonomi Tumbuh Merata. Menurut Suansri (2003:21-22) dalam (Nurhidayati & Fandeli, 2012) *Community Based Tourism* memiliki dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari dimensi yang mempengaruhi menuju pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan desa tersebut akan diteliti sehingga dapat diketahui bagaimana suatu pariwisata menjadi pariwisata menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT).

